

**ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
SKRIPSI**

Oleh:

ANJU AGUSTIN DAMANIK

NIM 52.15.304.1

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)
Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara**

Oleh :

ANJU AGUSTIN DAMANIK

NIM 52.15.304.1

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anju Agustin Damanik

NIM : 52153041

Tempat/Tanggal Lahir : Rappah/16 Agustus 1996

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jalan Pancing, Gang Murni, Kerin House No. 24 Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Anju Agustin Damanik
NIM. 52153041

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:

Anju Agustin Damanik
NIM. 52153041

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 02 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

M. Irwan Padli Nasution, S.T., M.Kom
NIP. 197502132006041003

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIP. 199009262018031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 19730510199803 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**ANALISIS PERAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**” an. Anju Agustin Damanik, NIM 52153041 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 21 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Anggota

Kamila, SE, Ak.M.Si
NIP. 197910232008012014

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIP. 199009262018031001

Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Anju Agustin Damanik. NIM. 52153041. Skripsi berjudul **“Analisis Peran Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara”**. Pembimbing I Bapak M. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom dan Pembimbing II Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Unsur-unsur pengendalian intern berperan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan metode pengumpulan data menggunakan data kuesioner. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang berada dibagian keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Penilaian resiko berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan secara simultan, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Pengendalian intern Pemerintah, Kinerja Keuangan, Dinas Kesehatan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Peran Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Stata Satu (S1) jurusan Akuntansi Ssyariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih teruntuk berbagai pihak yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan segala yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Hendra Harmain, M.Pd** selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu **Kusmilawaty, SE, M.Ak** selaku sekertaris jurusan.

3. Bapak **M. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom** selaku pembimbing I dan Bapak **Rahmat Daim Harahap, M.Ak** selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beserta para pegawai yang telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian serta banyak membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Orang tua tercinta Ayahanda **Jauman Damanik** dan Ibunda **Kasmianna Saragih** yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
7. Kakak dan abang tercinta **Horasni Damanik S.Pd, Winda Damanik SE, Riahma Putri Damanik S.Pd, Muhairun Panjaitan SH**, juga adik tersayang **Rohmada Putra Damanik** yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
8. Sahabat-sahabat tercinta **Mila Aguspita S. Akun, Lili Aulia S. Akun, Rizki Arvi Yunita S. Akun, Nur Faznita Elmi S. Akun**, dan **Nur'aini S. Akun** yang selalu mendukung dan memberi motivasi bagi penulis. Terimakasih banyak telah menjadi motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi salah satu bagian dari kalian yang luar biasa.
9. Sahabat tersayang **Cici Novianti Purba Amd. Par**, terimakasih banyak karena telah menjadi motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabat terkasih **Nur Asmayani S. Akun, Khairunnisa Harahap S. Akun** dan **Pajarisa Siregar S. Akun** terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.

11. Seluruh keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan semangat Teman-teman stambuk 2015 kelas Akuntansi Syariah B yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan.
12. Dan semua pihak yang turut mendo'akan, memberikan semangat, motivasi dan telah berkenan membantu penulis.

Tidak adanya nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih penulis, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas dengan kebaikan, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekhilafan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah wabarakaatuh

Medan, 02 Oktober 2019

Penulis

Anju Agustin Damanik
NIM. 52153041

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	8
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	8
a. Pengertian Kinerja	8
b. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	8
c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah.....	9
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	11
e. Kinerja Menurut Islam.....	11
f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	13

2. Pengendalian Internal	16
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	16
b. Tujuan Pengendalian Intern Pemerintah	17
c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	17
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern	20
e. Manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	21
f. Peranan Sistem Pengendalian Interen	21
B. Penelitian Sebelumnya	23
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
1. Lokasi Penelitian	36
2. Waktu Penelitian.....	37
C. Populasi Dan Sampel	37
1. Populasi.....	37
2. Sampel	37
D. Data Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Defenisi Operasional.....	39
G. Tekhnik Analisis Data.....	45

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	51
1. Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	51
2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	52
3. Uraian Tugas	55
B. Deskripsi Data Penelitian	61

C. Uji Kualitas Data.....	63
1. Uji Validitas	63
2. Uji Reliabilitas.....	64
D. Uji Asumsi Klasik	65
1. Uji Normalitas	65
2. Uji Multikolinearitas.....	66
3. Uji Heteroskedastisitas	68
E. Analisis Regresi Linier Berganda	69
F. Hasil Pengujian Hipotesis.....	70
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
2. Uji Parsial atau Uji t	71
3. Uji Simultan atau Uji F.....	72
G. Pembahasan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Sebelumnya	23
3.1 Waktu Penelitian.....	37
3.2 Skala Likert.....	39
3.3 Defenisi Operasional Variabel Independen.....	42
3.4 Defenisi Operasional Variabel Dependen	44
4.1 Data Hasil Kuisisioner	61
4.2 Deskripsi Responden.....	62
4.3 Hasil Uji Validitas.....	63
4.4 Hasil Uji Reliabilitas	65
4.5 Hasil Uji Normalitas	65
4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	67
4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
4. 9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	70
4.10 Uji Parsial	71
4.11 Hasil Uji Simultan.....	73

DAFTAR GAMBAR

2. 1 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Grafik Histogram	66
4. 3 Grafik <i>Scatterplot</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuisisioner Penelitian
2. Rekapitulasi Data Jawaban Responden
3. Hasil Uji SPSS
4. Surat Izin Riset Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001, orientasi penyelenggaraan daerah telah bergeser dari ketergantungan pada pemerintah pusat kepada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.¹

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.² Di lingkungan pemerintah, salah satu permasalahan yang menjadi isu nasional adalah masalah penyerapan anggaran yang relatif rendah serta lambat oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil yang pada akhirnya akan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat kemiskinan. Dalam pelaksanaan kegiatan, instansi pemerintah juga dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan kegiatannya yang tentu saja akan berpengaruh pada efisiensi proses kegiatan tersebut, serta efektivitas hasilnya. Hasmah menyatakan bahwa pengendalian internal diperlukan untuk meyakinkan bahwa sebagian besar ketidakpastian, baik dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatan telah diperhitungkan pengaruhnya pada pencapaian hasil akhir kegiatan. Sistem ini diharapkan dapat memberi keyakinan terhadap penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, meningkatkan daya serap anggaran, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.³

¹ Moeheriono dalam skripsi Siti Lailis Shoimah, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Hotel di Kabupaten Jember*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2015), h. 2.

² Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

³ Hasmah dalam Rosita, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar), h. 2.

Pengendalian internal dapat membantu organisasi mencapai kinerja dan memastikan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja yang tinggi dikarenakan penerapan sistem pengendalian secara efektif. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian internal.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di kota Medan yang berperan dalam menyusun rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan oleh karena itu Dinas Kesehatan harus memiliki sistem pengendalian intern pemerintah yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴ Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yang mengatur tentang SPIP mempertegas bahwa setiap entitas pelaporan dan akuntansi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengendalian intern. PP tersebut mengacu pada Konsep dari *Comitte of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam mengatur kewajiban penyelenggaraan Pengendalian Internal. Definisi SPIP sesuai peraturan diatas adalah sistem pengendalian intern yang wajib untuk diselenggarakan secara masif dan terintergrasi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur SPIP terdiri atas lima bagian yang semuanya saling terhubung,

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

adapun unsur pertama yaitu Lingkungan Pengendalian yang kondusif dimana kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Kedua Penilaian Risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Ketiga Kegiatan Pengendalian, berfungsi untuk menghilangkan dampak atas risiko yang ada. Keempat Informasi dan Komunikasi antar elemen pelaksana kegiatan pengendalian. Kelima Pemantauan Pengendalian oleh supervisor atau pimpinan entitas.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam peraturan pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan.⁶ Sistem pengendalian internal bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Sistem pengendalian internal akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya.

Dari hasil wawancara penulis mengenai pengendalian internal di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ternyata masih terdapat masalah yang dihadapi seperti adanya perangkapan tugas di beberapa bidang sehingga terdapat

⁵ Ahmad Saifudin, *Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah, dan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*, (tesis, fakultas ekonomi dan bisnis universitas sebelas maret surakarta, 2017), h. 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dan 2.

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyelewengan, hal ini tentunya belum sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi, yang mana Pemisahan fungsi ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau kecurangan, serta pembuatan dan penggunaan dokumen yang belum lengkap baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting lainnya.⁷ Masalah tersebut tentunya berdampak terhadap kinerja keuangan. Karena sistem pengendalian intern yang baik diharapkan mampu mencegah kesalahan dan kecurangan. Serta jika dilihat dari data dana SiLPA Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya dan terjadi penurunan pada tahun selanjutnya, maka hal ini tentu menjadi suatu hal yang harus diteliti lebih dalam lagi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Analisis Peran Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya perangkapan tugas di beberapa bidang sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyelewengan.
2. Pembuatan dan penggunaan dokumen yang belum lengkap baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting lainnya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hanya pada pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dan kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

⁷ Jamaluddin Manik, Pegawai dibagian SPIP, wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 1 April 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah Pemantauan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh penilaian risiko terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kegiatan pengendalian terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh Informasi dan komunikasi terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

5. Untuk menganalisis pengaruh Pemantauan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui arti pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya mengenai analisis peran pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.⁸ Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pegawai dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan. Kinerja menjadi rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan.

b. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.⁹ Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

⁸ Moeheriono dalam skripsi Siti Lailis Shoimah, Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Hotel di Kabupaten Jember, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2015), h. 2.

⁹ Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya.¹⁰

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.¹¹

c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), proses (*Process*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya, jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan.
- 2) Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/

¹⁰ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

¹¹ *Ibid*, h. 16

instansi. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

- 3) Indikator Keluaran (*Outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.
- 4) Indikator Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefits*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator Dampak (*Impacts*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.¹² Misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

¹² Mashun dalam Usman Dan Lukman Pakaya, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*, (Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo 2014) h. 19.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

1) Faktor kemampuan

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2) Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Dari faktor-faktor diatas disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja muncul dalam karakteristik perorangan, yaitu dimulai dengan faktor lingkungan dan kemampuannya yang sangat berpengaruh karena dari sana akan ditemukan semangat dan motivasi, sehingga dalam pekerjaannya tumbuh rasa tanggung jawab agar targetnya dapat tercapai.¹³

e. Kinerja menurut Islam

Kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu. Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam Q.S. Al-jumu'ah (62): 10 yang berbunyi :

¹³ Mangkunegara dalam Hairul Ansar, *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2009*, (Tugas Akhir, Universitas Komputer Indonesia, 2009), h.14.

Q.S. Al-jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*¹⁴

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh manusia tentu akan ada balasannya. Manusia yang melakukan pekerjaan dilarang untuk berbuat curang, karena Allah Subhanahuwata'ala Maha melihat dan Maha mengetahui. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahuwata'ala dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*¹⁵

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah Subhanahuwata'ala, oleh karena itu seharusnya dalam bekerja kita harus menjunjung tinggi keseriusan dan

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Q.S. Al-jumu'ah (62): 10

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Q.S. Al-Baqarah (2): 110

memiliki motivasi untuk bekerja dengan baik dan memberikan manfaat dari pekerjaan kita.¹⁶

f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 14 disebutkan bahwa laporan keuangan (*financial statement*) pemerintah terdiri dari dua jenis yaitu laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sedangkan laporan finansial (*finance report*) terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).¹⁷

Masing-masing unsur laporan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode.¹⁸ Struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, SiLPA/SiKPA yang merupakan sisa lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan

¹⁶ Dewi Aidil Fitria Wati, “Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 41.

¹⁷ Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*, (Bandung: PUSTKA RAHMAT, cet 2, 2016), h. 116.

¹⁸ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, cet 2, 2007), h. 387.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang biasa disingkat SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurangbaik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.¹⁹ Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.²⁰

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam PSAP BA 01 dijelaskan bahwa saldo perubahan anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo anggaran lebih awal, Penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain, Saldo anggaran lebih.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu.²¹

¹⁹ Ikhwani Ratna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau, Dalam Jurnal El-Riyasah*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018, H. 39-40.

²⁰ Andrie Novandy Dan Anhulaila M. Palampanga Dan Ridwan, *Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)*, Dalam *E-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 9, September 2015, h. 148.

²¹ Dedi Nordiawan *et al*, *Akuntansi Pemerinthan*, (Jakarta: Salemba Empat, cet 2, 2007), h. 153.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa (penjumlahan atau pengurangan surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non-operasional), pos luar biasa (terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan), surplus/defisit-LO.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. dan juga ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintah pada suatu periode.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan lagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Selain itu Catatan Atas Laporan

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan.²²

2. Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku.²³ Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. *Commite On Auditing Procedur American Institute Of Carified Public Accountant* (AICPA) mengemukakan bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.²⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁵ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang

²² Abdul Hafiz Tanjung, "Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010", (Bandung: ALFABETA, Cet 2, 2013), h. 66

²³ TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), h. 36.

²⁴ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 59.

²⁵ Faiz Zamzami, *et.al.*, *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), h. 31.

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²⁶

b. Tujuan Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat (3), yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- 1) Efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 2) Keandalan laporan keuangan
- 3) Pengamanan aset negara
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁷

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) Bagian kesatu BAB II unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

1) Lingkungan pengendalian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 Bagian kedua disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kepemimpinan yang kondusif

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

²⁷ *Ibid*

- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 Bagian ketiga disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

a) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metode yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b) Analisis risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

3) Kegiatan pengendalian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 18 Bagian keempat disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang telah dijelaskan terdiri atas:

- a) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b) Pembinaan sumber daya manusia
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) Pengendalian fisik atas aset
- e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f) Pemisahan fungsi
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan Kejadian.
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 41 Bagian kelima disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 43 Bagian keenam disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

a) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

c) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.²⁸

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern

1) Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya

Untuk mendapatkan seorang karyawam yang kompeten, suatu organisasi dapat memberikan gaji yang baik, memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.

2) Tugas Pertanggungjawaban

Semua tugas/kewajiban telah didefinisikan dengan jelas dan ditugaskan pada masing-masing individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

3) Memberikan kekuasaan yang tepat

Suatu organisasi biasanya mempunyai sekumpulan aturan-aturan tertulis yang memuat prosedur-prosedur pengesahan setiap penyimpangan dari kebijaksanaan standar akan membutuhkan pemberian kuasa yang layak/pantas.

4) Pemisahan Tugas

Konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan dan tugas memberikan ketepatan bagi catatan-catatan akuntansi.²⁹

e. Manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Manfaat sistem pengendalian intern pemerintah menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yaitu:

- 1) Mendeteksi terjadinya kesalahan (*mismanagement*) dan *fraud* dalam pelaksanaan aktivitas organisasi.
- 2) Membantu pengamanan aset terkait terjadinya kecurangan (*fraud*), pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.³⁰

f. Peranan Sistem Pengendalian Interen

Secara garis besar SPI memiliki peranan yang sangat penting. Dapat dijelaskan bahwa peranan ini saling mendukung agar sistem yang ada memperoleh hasil yang maksimal bagi perusahaan. Adapun peranan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

²⁹ <https://www.materiakuntansi.com/kriteria-sistem-pengendalian-intern-yang-baik-dan-efektif>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

³⁰ Aditya Rindhana Putra Yunindra, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2016), h. 15

1) *Preventive Control*

Pengendalian untuk pencegahan perannya adalah mencegah timbulnya suatu masalah sebelum permasalahan tersebut muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Sebab tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.

2) *Detective Control*

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contohnya adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3) *Corrective Control*

Berperan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam *preventive* dan *detective control*. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari *corrective control* adalah pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut.

Dari berbagai peranan SPI diatas tentu laporan keuangan yang dirancang tidak untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik saja. Sebagai pengguna utama laporan keuangan perlu memahami serta membaca mengenai content laporan tersebut. Tanpa memahami substansi laporan tersebut, perusahaan akan bias dalam melakukan pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, auditor (akuntan) harus ikut memaksimalkan kontribusinya dalam peningkatan profesionalisme melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Oleh karena itulah, Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai lembaga

tempat bernaungnya seluruh akuntan di Indonesia perlu mencanangkan visi yang kuat dalam pembinaan kepada semua anggota.³¹

B. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Peran Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diantaranya dikutip dari beberapa sumber. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
Sukma Selviany Tolley, Ridwan, dan Muh. Yunus Kasim (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi	Terdapat perbedaan pada studi kasus.	1. Sama-sama meneliti Pengendalian intern dan Kinerja. 2. Menggunakan metode penelitian yang sama.	1. Berdasarkan analisis terhadap pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

³¹ Kayadi Hidayat *et, al*, *Kajian Peranan Sistem Pengendalian Intern Dalam Menunjang Informasi Keuangan*, dalam Jurnal Universitas PGRI, h. 8.

				Kabupaten Sigi. 2. Variabel lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. 3. Variabel penilaian resiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. 4. Variabel kegiatan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi 5. Variabel informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--	--	--	--	--

				Kabupaten Sigi. 6. Varaibel pemantauan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
Rosita (2014)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010	Terdapat perbedaan pada studi kasus.	1. Sama-sama meneliti Pengendalian intern dan Kinerja keuangan. 2. Menggunakan metode penelitian yang sama.	Variabel faktor-faktor pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian memiliki pengaruh positif signifikan baik secara simultan ataupun parsial terhadap kinerja keuangan.
Mulyadi dan P. Haryoso	Peranan Sistem Pengendalian	Terdapat perbedaan pada studi kasus.	1. Sama-sama meneliti Pengendalian	1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif

	Internal Dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Menentukan Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Surakarta		intern 2. Menggunakan metode penelitian yang sama.	dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Surakarta. 2. Penafsiran Resiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Surakarta 3. Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Surakarta. 4. Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Surakarta. 5. Pengawasan berpengaruh positif dan tidak signifikan
--	--	--	---	--

				<p>terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Surakarta</p> <p>6. Lingkungan Pengendalian, Penafsiran Resiko, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pengendalian, Pengawasan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Surakarta.</p>
Rizky Fitriyanti (2015)	<p>Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan</p>	<p>1. Terdapat Perbedaan Pada Studi Kasus</p> <p>2. Menggunakan Variabel yang berbeda yakni Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>1. Sama-sama meneliti Pengendalian intern dan Kinerja keuangan.</p> <p>2. Menggunakan metode penelitian yang sama.</p>	<p>1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti.</p>

	Pemerintah (Studi Empiris Skpd Kabupaten Kepulauan Meranti)			<p>2. Penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>3. Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p>4. Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen</p>
Safrida	Pengaruh	1. Terdapat	1. Sama-Sama	1. Secara parsial sistem

Hanum, Edi Zulfiar Dan Neo Agustina (2017)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Dinas Dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)	Perbedaan Pada Studi Kasus 2. Menggunakan Variabel Yang Berbeda Yakni Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi	Meneliti Pengendalian Intern Dan Kinerja Keuangan. 2. Menggunakan Metode Penelitian Yang Sama.	pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 2. Pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 3. Sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 4. Sistem pengendalian
---	--	---	--	--

				<p>internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.</p> <p>5. Sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar 88%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.³² Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intren melekat sepanjang kegiatan serta dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Oleh sebab itu latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan paket reformasi keuangan negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik dan *Clean Government*.

Menurut COSO (*Commitee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission*) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen ini bersumber dari cara manajemen (pimpinan) menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu (*built in*) dan terjalin (*permeatted*) dalam proses bisnis. COSO merumuskan lima komponen tersebut sebagai, Lingkungan Pengendalian (*control enviroment*), Penilaian resiko (*risk assesment*), Aktivitas Pengendalian (*control activities*), Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) serta Pemantauan (*monitoring*).

Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dari setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah membawa suasana yang nyaman bagi setiap penyelenggara pemerintah untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya

³² Zamzami, *et.al.*, *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), h. 31.

sebagai aparatur sipil negara sangatlah berperan besar. Lingkungan pengendalian merupakan salah satu faktor terbesar yang mendukung terciptanya sistem pengendalian intern. Selain lingkungan kerja yang kondusif, adanya kebijakan yang sehat terhadap pembinaan sumber daya manusia yang ada juga sangat diperlukan. Lingkungan pengendalian yang baik sangat berperan dalam mengatasi kendala-kendala dalam setiap tugas sehingga setiap tugas dapat selesai sesuai target. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan dalam suatu instansi, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Selain itu keharmonisan dikalangan pegawai baik antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan di tiap instansi juga menggambarkan terciptanya suasana kerja yang nyaman sehingga setiap kegiatan juga dapat berjalan dengan baik, sumber daya yang cukup juga menjadi faktor penunjang lainnya. Diterapkannya penilaian resiko yang baik diharapkan dapat mencegah secara dini terhadap penyimpangan selain itu dapat membantu manajemen dalam menyiapkan tindakan pengendalian yang harus diambil jika terjadi penyimpangan. Penilaian resiko yang baik yang dilakukan pada tiap tahapan pelaksanaan proses pekerjaan dan dilakukan secara terus menerus akan meminimalkan resiko yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.³³

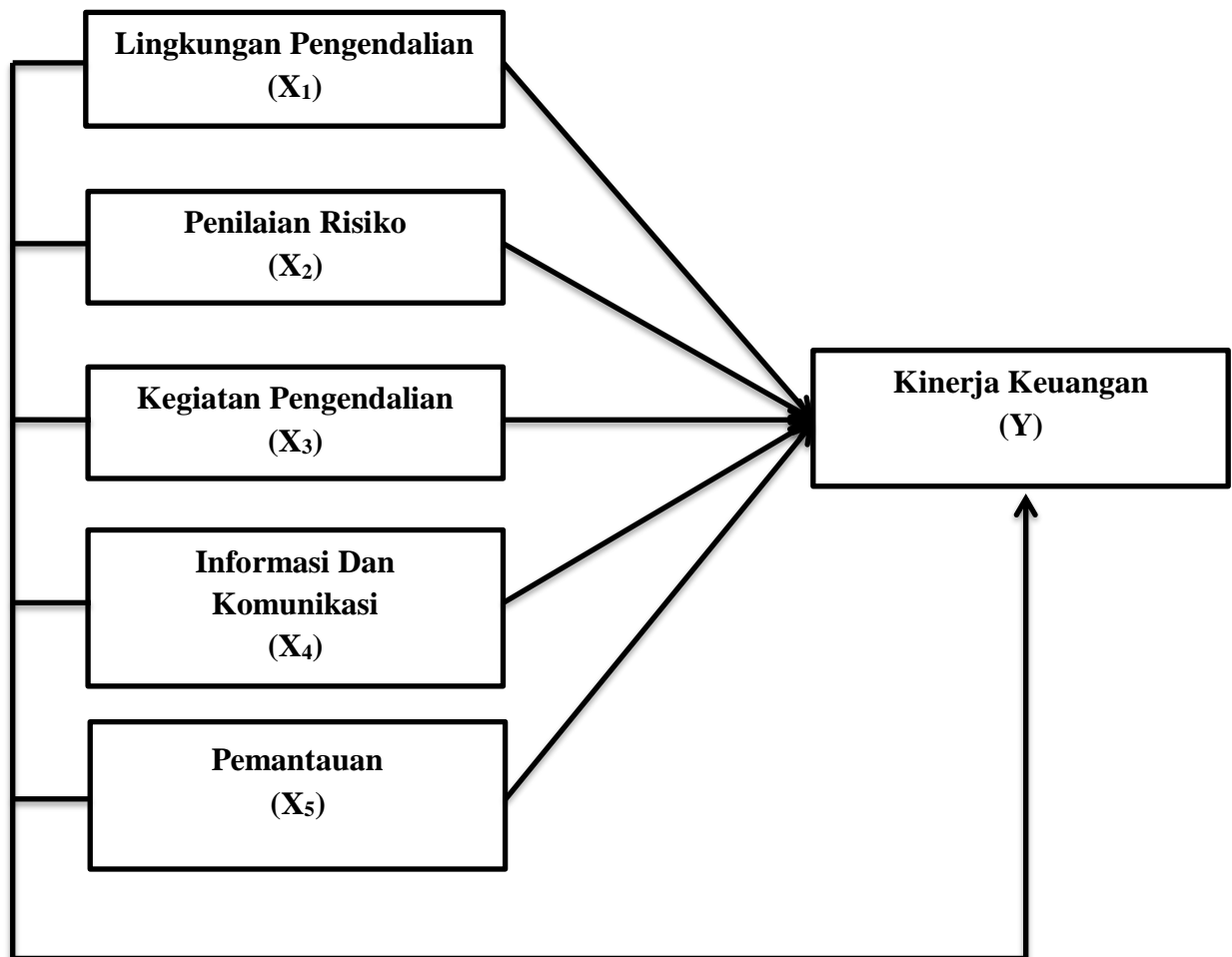
Pelaksanaan revidu terhadap kinerja keuangan dalam suatu instansi perlu dilakukan untuk meninjau sejauh mana setiap instansi telah melakukan kegiatan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi juga sangat dibutuhkan oleh setiap instansi sehingga informasi-informasi yang sifatnya sangat rahasia tidak mudah bocor ke publik, selain kedua hal tersebut otorisasi atas setiap transaksi juga menjadi satu keharusan yang suka atau tidak harus dilakukan oleh setiap instansi untuk mengurangi terjadinya penyimpangan. Kegiatan pengendalian yang baik diharapkan akan membantu manajemen dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

³³ Sukma Selviany Tolley, *et.,al*, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi*, dalam e-Jurnal Katalogis, Vol.5 No. 2 Februari 2017, h. 185-186.

Pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik double entry yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel, sehingga dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya Pemantauan yang berkelanjutan serta evaluasi yang terpisah yang selalu dilaksanakan oleh instansi sangat berguna untuk melihat sejauh mana instansi telah merespon hasil audit dan melakukan tindak lanjut terhadap setiap temuan auditor. Setelah melakukan proses pemantauan ini diharapkan setiap satuan kerja perangkat daerah membuat laporan hasil pemantauannya untuk menjadi acuan bagi aparat pengawas intern pemerintah ketika melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil audit.³⁴

Berdasarkan pada telaah literatur dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, h. 187.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Hipotesis juga merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁵ Hubungan antara variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} = Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

³⁵ Sujoko Efferin,*et.,al*, Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2008), h. 44.

- H₀₁ = Lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- H_{a2} = Penilaian risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H₀₂ = Penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- H_{a3} = Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H₀₃ = Kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H_{a4} = Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H₀₄ = Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H_{a5} = Pemantauan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H₀₅ = Pemantauan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H_{a6} = Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
- H₀₆ = Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dengan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁶ Kuantitatif didefinisikan sebagai hubungan diantara variabel dan konstanta dalam susunan dari sebuah rumus matematika. Hubungan yang dijelaskan kemudian dapat diuji dengan menggambarkan kondisi-kondisi khusus dan mengobservasi apakah output mengambil nilai-nilai khusus (dengan kesalahan pengukuran).³⁷

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Jln. HM. Yamin SH No. 41AA.

³⁶ Sugiyono Dalam Eva Kusuma Abdi Jayanti, *et.,al, Pengaruh Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun)*, dalam Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi-Fkip Universitas Pgri Madiun Vol 7 No 1, 2009, h. 4.

³⁷ Arfan Ikhsan,*et.,al, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 60.

2) Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Agustus 2019 sampai dengan selesai. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengajuan Judul								
2.	Bimbingan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Bimbingan Skripsi								
5.	Sidang Munaqasah								

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019.

C. Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.³⁸ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.³⁹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik penentuan sampel bila

³⁸ *Ibid.*, h. 105.

³⁹ Efferin, et., al, *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet Ke-1, 2008), h. 74.

semua populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁴⁰ Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi dijadikan sampel yaitu seluruh pegawai yang berada dibagian keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang.

D. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴¹ Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisisioner. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Teknik ini memberikan tanggungjawab kepada reponden untuk membaca dan menjawab pertanyaannya.⁴²

Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terstruktur dan responden tinggal memberi tanda *check list* (✓) pada jawaban yang dipilih, kemudian responden langsung mengembalikan daftar pertanyaan setelah diisi.

⁴⁰ Sugyono Dalam Skripsi Rima Rosmawati, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, (Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung, 2018) h. 81.

⁴¹ Indra Maipita, *Metodogoli Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Managemen*, (Yogyakarta: Digibooks, Cet Ke-1, 2010), h. 103.

⁴² Arfan Ikhsan Dan Imam Ghozali, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Medan: PT. Madju Medan Cipta, Cet Ke-1, 2006), h. 106.

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Alternatif jawaban pada setiap pernyataan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiono, 2010.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria.⁴³ Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pengendalian Intern Pemerintah dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

1. Variabel Independen (Bebas)

a. Lingkungan Pengendalian (X_1)

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku

⁴³ Efferin,et.,al, *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet Ke-1, 2008), h. 39.

positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko (X_2)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko atau penaksiran risiko juga dapat didefinisikan sebagai identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian risiko diawali dengan penetapan dan maksud tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik tingkat instansi maupun tingkat kegiatan, selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik dari dalam maupun dari luar instansi. Selanjutnya dilakukan manajemen risiko dan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

c. Kegiatan Pengendalian (X_3)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan oleh instansi pemerintah lain, disebabkan karena perbedaan visi, misi dan tujuan organisasi, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah atau latar belakang serta budaya organisasi, risiko yang dihadapi organisasi.

d. Informasi dan komunikasi (X_4)

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Informasi relevan dan dapat diandalkan berupa informasi keuangan maupun non keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal.

e. Pemantauan (X_5)

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Indikator sistem pengendalian intern pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimensi lingkungan pengendalian sebanyak 5 butir indikator, selanjutnya dimensi penilaian resiko sebanyak 2 butir indikator, dimensi kegiatan pengendalian diperoleh 5 butir indikator, dimensi informasi dan komunikasi 2 butir indikator dan dimensi pemantauan sebanyak 3 butir indikator.

2. Variabel Dependen (Terikat)

a. Kinerja Keuangan (Y)

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Variabel kinerja keuangan diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu

indikator masukan (*inputs*), proses (*Process*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Dalam penelitian ini penulis melakukan modifikasi terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuisioner. Pernyataan yang diajukan kepada responden sebanyak 30 butir pertanyaan. Dengan Skala 1 berarti sangat tidak setuju (STS), skala 2 berarti tidak setuju (TS), skala 3 berarti netral (N), skala 4 berarti setuju (S), dan skala 5 berarti sangat setuju (SS).

Tabel 3. 3 Defenisi Operasional Variabel Independen

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Lingkungan Pengendalian (X ₁)	Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.	1. Penegakan integritas dan nilai etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 5. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan	Menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5.

		sumber daya manusia.	
Penilaian Risiko (X ₂)	Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi risiko 2. Analisis risiko 	Menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5.
Kegiatan Pengendalian (X ₃)	Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan 2. Pembinaan sumber daya manusia 3. Pengendalian fisik atas aset 4. Pemisahan fungsi 5. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. 	
Informasi dan Komunikasi (X ₄)	Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan 	Menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5.

	dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.	2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.	
Pemantauan (X ₅)	Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.	1. Pemantauan berkelanjutan 2. Evaluasi terpisah 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.	Menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5.

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, diolah 2019.

Tabel 3. 4 Defenisi Operasional Variabel Dependen

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.	1. Indikator Masukan 2. Indikator Proses 3. Indikator Keluaran 4. Indikator Hasil 5. Indikator Manfaat	Menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai 5.

Sumber: Usman Dan Lukman Pakaya (2014) Diolah 2019.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *product moment* dari *pearson*. Hasil uji ini dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan dikatakan tidak valid apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *Cronboach Alpha* lebih dari 0.60.⁴⁴

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model linear berganda yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas.⁴⁵ Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Ghozali Dalam Tesis Susilo Prapto, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Tesis, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 78

a. Uji Normalitas

Normalitas bertujuan mengkaji apakah dalam sebuah model regresi variable dependen (terikat), variable independen (bebas) atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dalam penelitian ini digunakan *Kolmogorov – Smirnov* (K-S) untuk menghitung distribusi normal data. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($>0,05$), maka data tersebut terdistribusi secara normal. Dan begitupun sebaliknya.⁴⁶

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinearitas.⁴⁷

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik

⁴⁵ Taufan Dharmawan Dan Nono Supriatna, *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)*, Dalam Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol 4 No. 1, 2016, 941-948, h. 945.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Prpto, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Tesis, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h.79.

Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *standardized*.⁴⁸

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen.⁴⁹ Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

α = constanta

β_1 = Koefisien regresi lingkungan pengendalian

β_2 = Koefisien regresi penilaian resiko

β_3 = Koefisien regresi aktivitas pengendalian

β_4 = Koefisien regresi Informasi dan Komunikasi

β_5 = Koefisien regresi Pemantauan

X_1 = Variabel Lingkungan Pengendalian

X_2 = Variabel Penilaian Resiko

⁴⁸ Taufan Dharmawan Dan Nono Supriatna, *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)*, Dalam Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol 4 No. 1, 2016, 941-948, h. 945.

⁴⁹ Ademirna, *Pengaruh Kinerja Keuangan, Opini Audit, Dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Gowa)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, 2016), h. 69.

X_3 = Variabel Aktivitas Pengendalian

X_4 = Variabel Informasi dan Komunikasi

X_5 = Variabel Pemantauan

e = *error disturbances*

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Koefisien dari determinasi berganda merepresentasikan proporsi dari variasi Y yang dijelaskan oleh seperangkat variabel independen.⁵⁰

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien Determinasi (K_d) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

K_d = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

Berdasarkan penghitungan koefisien korelasi, maka dapat dihitung koefisien determinasi yaitu untuk melihat persentase pengaruh pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan.

⁵⁰ Efferin, et., al, *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet Ke-1, 2008), h.217.

b. Uji t atau Uji Parsial

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji parsial (uji t). Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji F atau Uji Simultan

Uji simultan (Uji F-statistik) digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hasil F_{hitung} ini dalam output SPSS dapat dilihat dalam lampiran ANNOVA. Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis diterima artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Organisasi kesehatan di Sumatera Utara sudah terbentuk dari tahun 1955, pada saat itu masih bernama Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Pada saat itu organisasi ini masih bergabung dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Medan dan belum memiliki gedung sendiri. Kemudian atas usaha yang dilakukan Dr. I Made Bagiastara sebagai pimpinan organisasi ini, maka pada pertengahan bulan Oktober 1957 Pengawas atau Kepala Bagian Dinas Kesehatan Sumatera Utara ini mempunyai gedung sendiri yang beralamat di Jln. Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA Medan. Kantor wilayah Kesehatan Departemen RI sudah dibentuk sejak Indonesia merdeka. Untuk tingkat Provinsi, organisasi ini disebut Inspeksi Kesehatan (ISKES). Pada tahun 1950 organisasi kesehatan ini telah mulai dirintis dan pada saat itu dipimpin oleh gubernur KDH Sumatera Utara. Pada tahun 1975 nama organisasi ini resmi menjadi Dinas Kesehatan Dati I Sumatera Utara. Secara ringkas sejarah penting dalam berdirinya organisasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada tahun 1947-1954 organisasi ini di beri nama Inspeksi Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1954 nama Inspeksi Kesehatan ini diganti menjadi Jawatan Kesehatan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Pada waktu itu Sumatera Utara dan Aceh masih merupakan satu wilayah. Pada tahun 1954 itu juga diadakan persiapan likuidasi (pemisahan) Inspeksi Kesehatan Sumatera Utara dan Aceh. Maka pada tahun 1955 terbentuklah Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang pada awalnya dipimpin oleh Dr. I Made Bagiastara.

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

a. Visi

Dengan mempertimbangkan hasil kajian atas Visi Gubernur Sumatera Utara, dan sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi gambaran kondisi pembangunan kesehatan yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing”

- 1) Masyarakat sehat adalah suatu kondisi dimana Penduduk Sumatera Utara sehat baik fisik, mental dan spiritual sehingga mampu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 2) Masyarakat mandiri, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mempertahankan kualitas kesehatannya.
- 3) Masyarakat berdaya saing, yaitu suatu kondisi dimana status masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tinggi dan berada diatas capaian nasional.

b. Misi

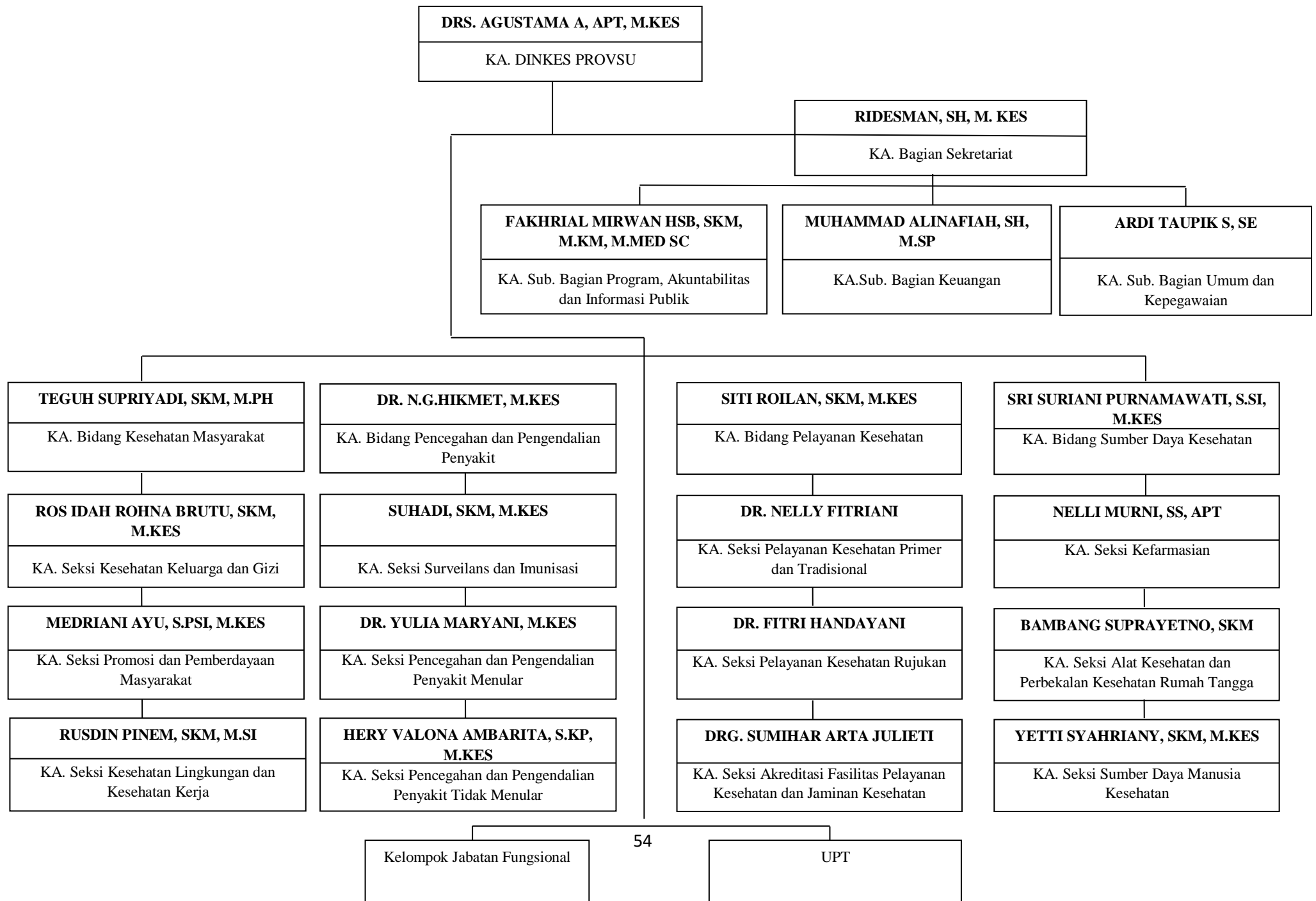
Dalam rangka mewujudkan Mewujudkan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing, maka ditetapkan beberapa misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1) Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau
- 2) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan.
- 3) Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan.
- 4) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan.

c. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugasnya maka di perlukan sistem organisasi yang baik. Faktor koordinasi sangat penting untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal, dan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai tentunya di butuhkan struktur organisasi. Di mana struktur organisasi itu di susun secara efektif dan efisien. Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan melalui strategi yang dipilih hubungan antara fungsi-fungsi, wewenang serta tanggung jawab setiap anggota organisasi. Adapun gambar struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA



3. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud diatas, Kepala Dinas dibantu oleh:

- 1) Sekretaris
- 2) Bagian umum
- 3) Bagian keuangan
- 4) Bagian program
- 5) Bidang bina pengendalian masalah kesehatan.
- 6) Bidang bina pelayanan kesehatan.
- 7) Bidang bina pengembangan SDM kesehatan.
- 8) Bidang bina jaminan dan sarana kesehatan

b. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam penyelenggaraan urusan yang meliputi manajemen perkantoran/ ketatausahaan dan administrasi umum, manajemen organisasi, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan asset Dinas Kesehatan Provinsi.

c. Bagian Umum

- 1) Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum/hukum kesehatan, hubungan kemasyarakatan dan informasi publik dan administrasi kepegawaian tingkat provinsi.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum/hukum kesehatan.

- 3) Melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah dinas.
- 4) Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi publik dan keprotokolan;
- 5) Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor.
- 6) Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat dan subbagian umum.
- 7) Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya.
- 8) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, serta pemetaan tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai.
- 9) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis.
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.

d. Bagian Keuangan

- 1) Melaksanakan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi keuangan dan perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tingkat provinsi.
- 2) Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja.
- 3) Melaksanakan pengkajian, pemetaan, dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan perhitungan belanja dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesesahan tingkat provinsi.
- 4) Melaksanakan verifikasi keuangan.

- 5) Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas.
- 6) Melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan keuangan dinas
- 7) Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan.
- 8) Melaksanaa pembinaan perbendaharaan keuangan.
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- 10) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.

e. Bagian Program

- 1) Melaksanankan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi, pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda), pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan, penyelenggaran kerjasama luar negeri, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tingkat provinsi.
- 2) Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis secara rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya.
- 3) Melaksanakan analisis, pemetaan penelitian, kajian-kajian dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya.
- 4) Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya.
- 5) Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian kabupaten/kota dalam penanganan urusan sub bagiannya.

- 6) Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas.
- 7) Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta UPT dinas.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 9) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 10) Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan

- 1) Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian masalah Kesehatan.
- 2) Melaksanakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung, bersumber binatang dan penyakit tidak menular
- 3) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang menimbulkan epidemi.
- 4) Melaksanakan imunisasi dan pencapaian UCI (Universal Child Immunization).
- 5) Melaksanakan promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan.
- 6) Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitas dan pendampingan masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

g. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

- 1) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
- 2) Melaksanakan upaya kesehatan dasar upaya kesehatan komunitas, upaya kesehatan dasar perkotaan.
- 3) Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak tingkat pelayanan kesehatan dasar.
- 4) Melaksanakan surveilans gizi buruk dan pemantauan penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan dasar
- 5) Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan dasar.
- 6) Melaksanakan upaya kesehatan rujukan/spesialistik dan pengelolaan sistem rujukan, upaya kesehatan rujukan perkotaan
- 7) Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak tingkat pelayanan kesehatan rujukan.
- 8) Melaksanakan surveilans gizi buruk dan pemantauan penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan rujukan.
- 9) Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan.

h. Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

- 1) Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
- 2) Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan rekomendasi tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga tertentu antar Kabupaten/Kota.
- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan ataupun kegiatan sejenis lainnya yang bersifat peningkatan dan pengembangan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik.
- 4) Melaksanakan registrasi dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.

- 5) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.
- 6) Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan uji kompetensi pejabat struktural, fungsional dan SDM kesehatan pemerintah/swasta
- 7) Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan perizinan tenaga medis, paramedis, tenaga non-medis/tradisional terlatih
- 8) Melaksanakan registrasi dan perijinan tenaga kesehatan asing dan melaksanakan registrasi, pemantauan dan pembinaan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Non Government Organization) lokal dan asing (luar negeri) yang bergerak terkait bidang kesehatan dan provinsi.
- 9) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberian izin kepada tenaga kesehatan asing.

i. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan

- 1) Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jaminan dan Sarana Kesehatan
- 2) Melaksanakan jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan
- 3) Melaksanakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan dan perizinan sarana kesehatan.
- 4) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian sarana kesehatan.
- 5) Melaksanakan bimbingan pra dan pasca akreditasi dan persiapan pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan
- 6) Melaksanakan bimbingan pra dan pasca audit dan persiapan pelaksanaan audit sarana kesehatan.
- 7) Melaksanakan pemberian izin sarana kesehatan dan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu.
- 8) Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi reagensia, vaksin, ketersediaan obat.

B. Deskripsi Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam *Microsoft Office Excel* dan diolah dengan menggunakan program *SPSS for windows*. Adapun waktu yang penulis butuhkan untuk mengumpulkan kembali kuesioner-kuesioner tersebut lebih kurang selama 8 hari. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 35 kuesioner kepada responden yang berada pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dari 35 kuesioner yang dibagikan sebanyak 32 kuesioner yang kembali.

Tabel 4. 1 Data Hasil Kuisisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang dikirim	35
Kuisisioner yang kembali	32
Kuisisioner yang tidak kembali	3
Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian	32

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019.

Adapun rincian deskripsi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2 Deskripsi Responden

No	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1.	Umur:		
	a. < 30 Tahun	8 Orang	25%
	b. 30-40 Tahun	7 Orang	21,9%
	c. > 40 Tahun	17 Orang	53,1%
Total Responden		32 Orang	100%
2.	Jenis Kelamin:		
	a. Laki-laki	15 Orang	46,9%
	b. Perempuan	17 Orang	53,1%
Total Responden		32 Orang	100%
3.	Pendidikan Terakhir:		
	a. SLTA/Sederajat	2 Orang	6,2%
	b. D-3	7 Orang	21,9%
	c. S-1	20 Orang	62,5%
	d. S-2	3 Orang	9,4%
	e. S-3	-	-
Total Responden		32 Orang	100%
4.	Lama Bekerja:		
	a. < 2 Tahun	1 Orang	3,1%
	b. 2-5 Tahun	9 Orang	28,1%
	c. > 5 Tahun	22 Orang	68,8%
Total Responden		32 Orang	100%

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2019.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dikatakan sah atau valid apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel sehingga n-2= 30. Maka nilai r_{tabel} diperoleh dalam *r Product moment* yaitu 0.361. Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir-butir pernyataan dari masing-masing variabel yaitu variabel Kinerja keuangan (Y), lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), dan pemantauan (X5).

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Lingkungan Pengendalian (X1)	X1. 1	0.619	0.361	Valid
	X1. 2	0.619	0.361	Valid
	X1. 3	0.667	0.361	Valid
	X1. 4	0.659	0.361	Valid
	X1. 5	0.637	0.361	Valid
Penilaian Risiko (X2)	X2. 1	0.805	0.361	Valid
	X2. 2	0.857	0.361	Valid
	X2. 3	0.871	0.361	Valid
	X2. 4	0.882	0.361	Valid
	X2. 5	0.784	0.361	Valid
Kegiatan Pengendalian (X3)	X3. 1	0.882	0.361	Valid
	X3. 2	0.850	0.361	Valid
	X3. 3	0.811	0.361	Valid
	X3. 4	0.858	0.361	Valid
	X3. 5	0.911	0.361	Valid
Informasi dan Komunikasi	X4. 1	0.828	0.361	Valid
	X4. 2	0.888	0.361	Valid

(X4)	X4. 3	0.837	0.361	Valid
	X4. 4	0.885	0.361	Valid
	X4. 5	0.850	0.361	Valid
Pemantauan (X5)	X5. 1	0.879	0.361	Valid
	X5. 2	0.850	0.361	Valid
	X5. 3	0.960	0.361	Valid
	X5. 4	0.839	0.361	Valid
	X5. 5	0.943	0.361	Valid
Kinerja Keuangan (Y)	Y. 1	0.971	0.361	Valid
	Y. 2	0.971	0.361	Valid
	Y. 3	0.823	0.361	Valid
	Y. 4	0.969	0.361	Valid
	Y. 5	0.955	0.361	Valid

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, maka dapat dilihat bahwa keseluruhan pernyataan untuk masing-masing variabel memiliki status valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0.361.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang mempunyai validitas. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (α). Jika nilai koefisien alpha $> 0,60$ maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal dan reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa keenam variabel lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut *reliable*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Lingkungan Pengendalian (X1)	0.633	Reliabel
Penilaian Risiko (X2)	0.894	Reliabel
Kegiatan Pengendalian (X3)	0.912	Reliabel
Informasi Dan Komunikasi (X4)	0.909	Reliabel
Pemantauan (X5)	0.938	Reliabel
Kinerja Keuangan (Y)	0.966	Reliabel

Sumber : Output SPSS, 2019.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$. Dasar pengambilan keputusan untuk *Kolmogorov-Smirnov* yaitu nilai *value* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed) > level of significant* ($\alpha = 5\%$)

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,11100488
	Absolute	,079
Most Extreme Differences	Positive	,079
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,448
Asymp. Sig. (2-tailed)		,988

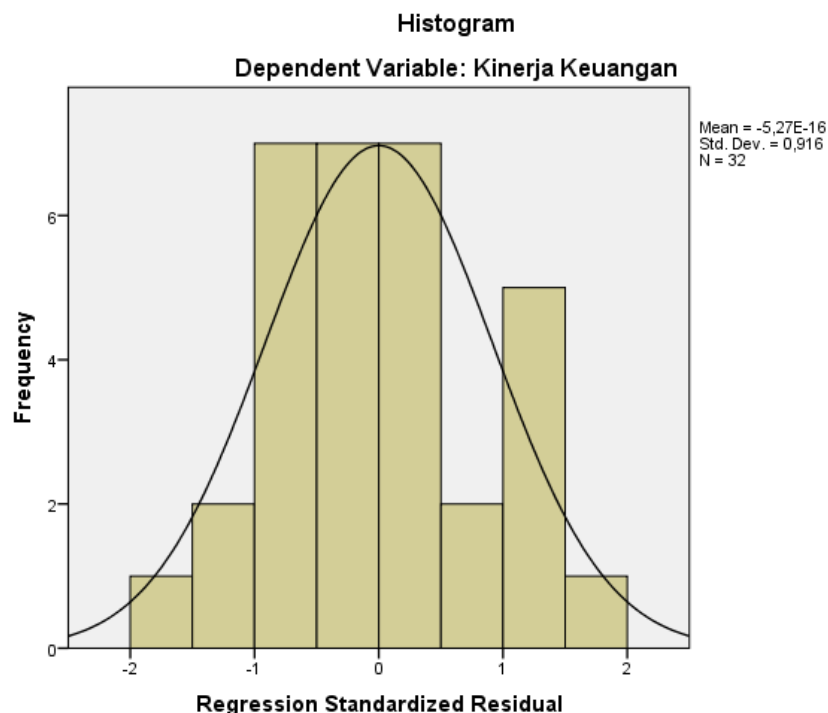
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 0.448 dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0.988. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.988 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram disajikan pada gambar 4.2 berikut ini:



Gambar 4.2 Grafik Histogram

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa histogram menunjukkan pola terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari pola kurva yang tidak melenceng ke kiri maupun melenceng ke kanan sehingga dapat disimpulkan grafik histogram menunjukkan pola terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya apabila nilai

tolerance < 0,10 dan *VIF* > 10, maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF* menunjukkan hasil seperti pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-15,319	9,205		-1,664	,108		
Lingkungan Pengendalian	1,194	,307	,467	3,885	,001	,838	1,194
Penilaian Risiko	-,610	,158	-,493	-3,869	,001	,744	1,344
Kegiatan Pengendalian	-,389	,137	-,331	-2,844	,009	,890	1,123
Informasi Dan Komunikasi	,666	,162	,503	4,113	,000	,807	1,239
Pemantauan	,614	,142	,568	4,329	,000	,702	1,425

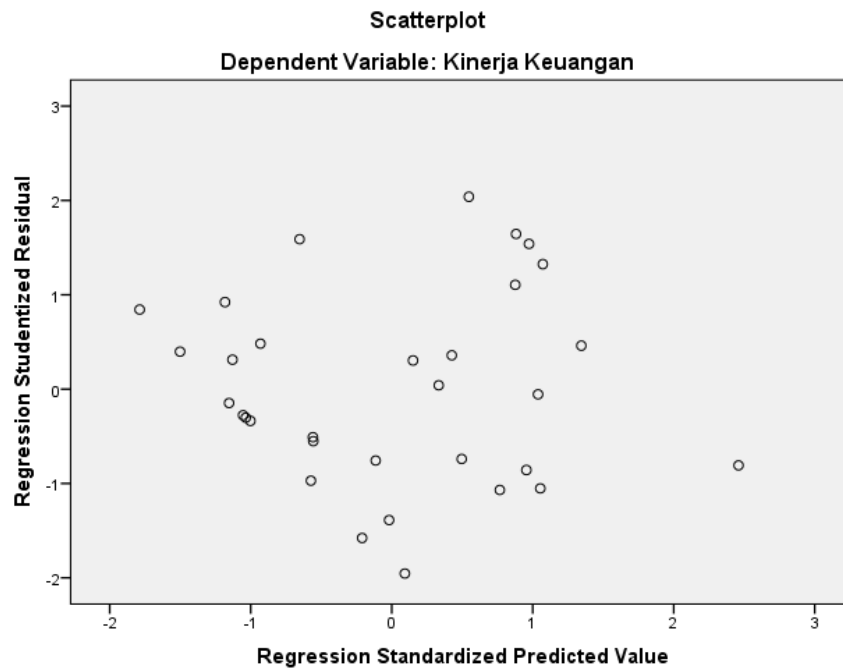
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui analisis grafik dengan cara membaca grafik *Scatterplot* dan menggunakan uji Glejser.



Gambar 4. 3 Grafik *Scatterplot*

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur serta titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

E. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi linier berganda untuk variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	-15,319	9,205		-1,664	,108
Lingkungan Pengendalian	1,194	,307	,467	3,885	,001
Penilaian Risiko	-,610	,158	-,493	-3,869	,001
Kegiatan Pengendalian	-,389	,137	-,331	-2,844	,009
Informasi Dan Komunikasi	,666	,162	,503	4,113	,000
Pemantauan	,614	,142	,568	4,329	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh hasil dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -15,319 + 1,194X_1 - 0,610X_2 - 0,389X_3 + 0,666X_4 + 0,614X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Konstanta sebesar -15,319 memberi pengertian jika seluruh variabel independen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan) bernilai konstan maka variabel dependen (kinerja keuangan) akan menurun sebesar - 15,319.
- 2) Koefisien regresi lingkungan pengendalian bernilai 1,194 menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga jika lingkungan pengendalian meningkat maka kinerja keuangan meningkat sebesar 1,194.
- 3) Koefisien regresi penilaian risiko bernilai - 0,610 menunjukkan bahwa variabel penilaian risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga jika Penilaian Risiko meningkat maka kinerja keuangan akan menurun sebesar - 0,610.

- 4) Koefisien regresi kegiatan pengendalian memiliki nilai sebesar - 0,389 menunjukkan bahwa variabel kegiatan pengendalian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga jika kegiatan pengendalian meningkat maka kinerja keuangan akan menurun sebesar - 0,389.
- 5) Koefisien regresi informasi dan komunikasi bernilai 0,666 menunjukkan bahwa variabel informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga jika Informasi dan Komunikasi meningkat maka kinerja keuangan juga akan meningkat sebesar 0,666.
- 6) Koefisien regresi pemantauan bernilai 0,614 menunjukkan bahwa variabel pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga jika pemantauan meningkat maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,614.

F. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,686	,625	2,305

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Informasi Dan Komunikasi, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Penilaian Risiko

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji R^2 pada tabel 4.8 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0.625 sehingga diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan dan kinerja keuangan sebesar 62,5% sedangkan sisanya 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Uji Parsial atau Uji t

Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai $\alpha > 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai $\alpha < 0,05$ maka hipotesis diterima, berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis untuk model regresi penelitian ini, derajat bebas ditentukan dengan rumus $n - k$. Dimana n merupakan banyak sampel sedangkan k merupakan banyaknya variabel bebas dan terikat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 responden sedangkan jumlah variabel bebas dan terikat yaitu 6 variabel, jadi dapat dituliskan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} df &= n - k \\ &= 32 - 6 \\ &= 26. \end{aligned}$$

Maka lihat pada kolom kelima distribusi t dengan $df = 26$ maka nilai $t_{\text{tabel}} = 2,055$. Hasil uji t untuk variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji Parsial

Variabel	$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$		Prob. Sig		Ket
	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	$\alpha = 5\%$	
Lingkungan Pengendalian	3,885	2,055	0,001	0,05	Sig
Penilaian Risiko	-3,869	2,055	0,001	0,05	Sig
Kegiatan Pengendalian	-2,844	2,055	0,009	0,05	Sig
Informasi Dan Komunikasi	4,113	2,055	0,000	0,05	Sig
Pemantauan	4,329	2,055	0,000	0,05	Sig

Sumber: Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

- 1) Variabel Lingkungan Pengendalian memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $3,885 > 2,055$ dengan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.
- 2) Variabel Penilaian Risiko memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $-3,869 > 2,055$ dengan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Penilaian Risiko berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.
- 3) Variabel Kegiatan Pengendalian memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $-2,844 > 2,055$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.
- 4) Variabel Informasi Dan Komunikasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $4,113 > 2,055$ dengan tingkat signifikan $0,009 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Informasi Dan Komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, maka H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak.
- 5) Variabel Pemantauan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $4,329 > 2,055$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, maka H_{a5} diterima dan H_{05} ditolak.

3. Uji Simultan atau Uji F

Uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dalam pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat derajat bebas/ *degree of freedom* (df) atau dikenal dengan df1 untuk pembilang (N1). Selanjutnya dengan menentukan derajat bebas/ *degree of freedom* (df) atau dikenal dengan df2 untuk penyebut (N2) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$df1 = k - 1$$

$$df2 = n - k$$

Dimana k adalah jumlah variabel bebas dan terikat dan n adalah jumlah sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 responden sedangkan jumlah variabel bebas dan terikat yaitu 6 variabel, jadi dapat dituliskan sebagai berikut;

$$df1 = 6 - 1 = 5$$

$$df2 = 32 - 6 = 26$$

Pengujian dilakukan pada $\alpha = 5\%$, maka nilai $F_{\text{tabel}} = 2,59$. Lihat pada $N1 = 5$ dan $N2 = 26$ pada tabel distribusi F.

Hasil Uji F untuk variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	301,353	5	60,271	11,343	,000 ^b
Residual	138,147	26	5,313		
Total	439,500	31			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Informasi Dan Komunikasi, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Penilaian Risiko

Sumber : Output SPSS, 2019

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.11 diperoleh nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dengan $F_{\text{hitung}} = 11,343$ yang lebih besar dari $F_{\text{tabel}} = 2,57$ atau $(11,343 > 2,57)$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang artinya Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, dan Pemantauan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan maka H_{a6} diterima dan H_{06} ditolak.

G. Pembahasan

Nilai koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom *adjusted R square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar $R^2 = 0,625$. Nilai tersebut berarti seluruh variabel independen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) mampu menjelaskan variabel dependen (kinerja keuangan) sebesar 62,5%, sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

1. Lingkungan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,885 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,055 ($3,885 > 2,055$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Maka hipotesis yang diajukan diterima (H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak). Hal ini dikarenakan instansi telah menerapkan langkah-langkah lingkungan pengendalian seperti peningkatan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. Langkah-langkah tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) yang menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa unsur lingkungan pengendalian yang baik memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja keuangan. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dari setiap pimpinan instansi membawa suasana yang nyaman bagi setiap penyelenggara pemerintah untuk bekerja dengan baik

sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara sangatlah berperanan besar.

2. Penilaian Risiko Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel penilaian risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,869 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,055 ($-3,869 > 2,055$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Maka hipotesis yang diajukan diterima (H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak). Hal ini disebabkan instansi telah mampu melaksanakan proses identifikasi risiko dan analisa risiko yang mungkin terjadi dalam proses kinerja keuangan sehingga dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Namun masih terdapat hal yang harus diperhatikan terkait penilaian risiko yang harus dimaksimalkan oleh instansi seperti melakukan tindakan perbaikan dengan segera apabila terjadi kesalahan. Hal ini dilakukan untuk mencegah secara dini terjadinya penyimpangan selain itu dapat membantu manajemen dalam menyiapkan tindakan pengendalian yang harus diambil jika terjadi penyimpangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) yang menunjukkan bahwa Penilaian Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah. Dimana penilaian risiko yang meliputi kegiatan identifikasi dan analisis risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi signifikan pengaruhnya terhadap kinerja anggaran pada instansi.

3. Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel kegiatan pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,844 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,055 ($-2,844 > 2,055$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Maka

hipotesis yang diajukan diterima (H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak). Hal ini dikarenakan instansi telah menerapkan langkah-langkah aktivitas pengendalian dalam kinerja keuangan antara lain, revidasi atas kinerja, pembinaan SDM, pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan indikator kinerja, otorisasi atas transaksi, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya sehingga berdampak pada membaiknya kinerja keuangan. Namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan secara maksimal seperti pemisahan fungsi (pemisahan tugas) yang memadai serta pembuatan dan penggunaan dokumen yang belum lengkap baik atas pengendalian internal maupun transaksi penting lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian internal pemerintah juga dijelaskan mengenai hal tersebut dalam Pasal 18 ayat 3 butir f yang berisi tentang pemisahan fungsi yang dijelaskan kembali dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi, yang mana Pemisahan fungsi ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, pemborosan, atau kecurangan. Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang, maksudnya tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisah-pisahkan dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis untuk menjamin adanya *checks and balances* dan mengurangi kesempatan terjadinya kolusi. Aspek utama transaksi atau kejadian meliputi otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, revidasi dan audit, serta penyimpanan dan penanganan aset”.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) yang menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah. Dimana dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan pengendalian yang merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan

bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah terlaksana haruslah dijalankan sebaik-baiknya didasarkan pada hasil penelitian dimana kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap kinerja APBD dan pengaruh tersebut signifikan.

4. Informasi Dan Komunikasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,113 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,055 ($4,113 > 2,055$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis yang diajukan diterima (H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak). Hasil regresi ini menunjukkan bahwa Informasi dan Komunikasi berpengaruh secara signifikan untuk menunjang kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan instansi telah menyediakan dan memanfaatkan segala bentuk dan sarana komunikasi di dalam lingkungan pekerjaan. Selain itu, pemerintah daerah juga mampu mengelola, mengembangkan dan memperbaharui informasi secara terus menerus sehingga dapat mendukung kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukma Selviany Tolley, Ridwan, Muh.Yunus Kasim (2017) yang menunjukkan bahwa Penyediaan berbagai bentuk sarana komunikasi sangatlah diperlukan disamping pemanfaatannya, selain itu setiap informasi harus terus menerus dikelola dan dikomunikasikan dengan baik serta diperbaharui secara terus menerus. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Rosita (2014) bahwa Informasi dan komunikasi penting bagi pengendalian yang efektif, informasi tentang rencana organisasi, lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, dan kinerja harus dikomunikasikan ke atas, ke bawah dan seluruh organisasi. Informasi dan komunikasi harus senantiasa diupayakan agar terlaksana maksimal mengingat akan pengaruhnya yang signifikan terhadap Kinerja keuangan.

5. Pemantauan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pemantauan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,329 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,055 ($4,329 > 2,055$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis yang diajukan diterima (H_{a5} diterima dan H_{05} ditolak). Hal ini dikarenakan pemantauan dilaksanakan dengan cara pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya sehingga dapat mendukung kinerja keuangan. Pemantauan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, karena kelima aspek yang terdapat dalam pemantauan merupakan faktor yang menunjang terciptanya kinerja keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukma Selviany Tolley, Ridwan, Muh.Yunus Kasim (2017) yang menunjukkan bahwa pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pada Pemerintah Daerah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Rosita (2014) bahwa Pemantauan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja APBD, sehingga wajib untuk melakukan pemantauan pengendalian internal berkelanjutan berada pada setiap orang dalam instansi pemerintah sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab kerjanya.

6. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Pemantauan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 11,343$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis yang diajukan diterima (H_{a6} diterima

dan H_{06} ditolak). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kinerja keuangan juga akan semakin baik, sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka kinerja keuangan juga akan semakin buruk.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, dalam hal ini penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sukma Selviany Tolley, Ridwan, Muh.Yunus Kasim (2017) bahwa berdasarkan analisis terhadap pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern diperoleh hasil bahwa secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan pengendalian berada pada tingkat keempat yang menjadi variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,885 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Dimana pernyataan yang memiliki kontribusi paling tinggi yaitu pernyataan keempat dengan nilai sebesar 154 poin. Adapun isi dari pernyataan tersebut yaitu pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi.
2. Penilaian risiko berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Variabel penilaian risiko berada pada tingkat ketiga variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,869 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Dimana pernyataan yang memiliki kontribusi paling tinggi yaitu pernyataan ketiga dengan nilai sebesar 132 poin. Adapun isi dari pernyataan tersebut yaitu penempatan pegawai baru didasarkan atas keahlian.
3. Kegiatan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Variabel kegiatan pengendalian yang berada pada posisi terakhir yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,844 dan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Dimana pernyataan yang

memiliki kontribusi paling tinggi yaitu pernyataan pertama dengan nilai sebesar 132 poin. Adapun isi dari pernyataan tersebut yaitu aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja.

4. Informasi dan komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Variabel informasi dan komunikasi berada pada tingkat kedua yang menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,113 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dimana pernyataan yang memiliki kontribusi paling tinggi yaitu pernyataan keempat dengan nilai sebesar 135 poin. Adapun isi dari pernyataan tersebut yaitu ketersediaan informasi (kelengkapan) yang dibutuhkan dalam melakukan tugas-tugas instansi sudah baik.
5. Pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa variabel dengan pengaruh paling tinggi terhadap kinerja keuangan yaitu variabel pemantauan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,329 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dimana pernyataan pertama memiliki kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 132 poin. Adapun isi dari pernyataan tersebut yaitu sudah tersedianya prosedur kegiatan pemantauan yang efektif atas pelaksanaan pengendalian intern, baik secara rutin maupun yang bersifat khusus.
6. Secara simultan, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan. Beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam lingkungan pengendalian diharapkan kepada pimpinan instansi dan seluruh pegawai agar dapat menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan instansi yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern serta manajemen yang sehat.
2. Dalam melaksanakan penilaian risiko, instansi diharapkan dapat memaksimalkan proses identifikasi dan analisis risiko sehingga dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses kinerja keuangan serta melakukan tindakan perbaikan dengan segera apabila terjadi kesalahan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian, instansi diharapkan dapat melaksanakan secara maksimal pemisahan fungsi (pemisahan tugas) dimana transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang, maksudnya tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisah-pisahkan dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis untuk menjamin adanya *checks and balances* agar dapat mengurangi kesempatan terjadinya kolusi.
4. Dalam melaksanakan informasi dan komunikasi, pimpinan instansi diharapkan dapat memaksimalkan komunikasi atas informasi yang efektif dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.
5. Dalam melaksanakan pemantauan, instansi diharapkan dapat memaksimalkan peran audit internal. Dimana kegiatan audit dilakukan secara berkelanjutan baik itu terhadap laporan keuangan instansi maupun terhadap kinerja keuangan sehingga dapat mencegah

terjadinya temuan oleh audit eksternal. Diharapkan pula agar tetap dapat mengevaluasi dan meningkatkan pemantauannya dalam melakukan pengalokasian dana anggaran yang sesuai, dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap proyek yang sedang diajukan, meningkatkan pegawai atau staf ahli dalam bidang keuangan.

6. Bagi penelitian selanjutnya, objek penelitian sebaiknya lebih diperluas untuk mendapatkan keterwakilan yang lebih besar atas populasi penelitian yang diteliti. Perluasan ini dapat berupa penambahan ruang lingkup geografis responden maupun penambahan jumlah responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademirna. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Opini Audit, Dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Gowa* (Skripsi). Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Aidil Fitria Wati, Dewi. *Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu* (Skripsi). Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Dharmawan, Taufan Dan Nono Supriatna, *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)*, Dalam Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol 4 No. 1, 2016, 941-948.
- Efferin, Sujoko *et.,al*, *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hidayat, Kayadi *et, al*, *Kajian Peranan Sistem Pengendalian Intern Dalam Menunjang Informasi Keuangan*, dalam Jurnal Universitas PGRI.
- Ikhsan, Arfan *et.,al*, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ikhsan, Arfan Dan Imam Ghozali. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Medan: PT. Madju Medan Cipta, 2006.
- James Sinaga, Edward. *Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah*, Dalam Jurnal Rechtsvinding, Vol 5 No. 2, 2016.
- Kusuma Abdi Jayanti, Eva *et.,al*, *Pengaruh Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun*, dalam Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi-Fkip Universitas PGRI Madiun Vol 7 No 1, 2009.

- Lailis Shoimah, Siti. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Hotel di Kabupaten Jember* (Skripsi). Jember: Universitas Jember, 2015.
- Maipita, Indra. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Digibooks, 2010.
- Manik, Jamaluddin. Pegawai dibagian SPIP, wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Mardi. *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nordiawan, Dedi. *et al, Akuntansi Pemerinthan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Nur Iswari, Nisa. *Pengaruh Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2016* (Skripsi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prapto, Susilo. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Tesis). Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Rindhana Putra Yunindra, Aditya. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung* (Skripsi). Bandung: Universitas Widyatama, 2016.
- Rosita. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Saifudin, Ahmad. *Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah, dan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan* (Tesis). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Selviany Tolley, Sukma. *et.,al, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi*, dalam e-Jurnal Katalogis, Vol.5 No. 2, 2017.

Sinurat, Marja. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, Bandung: PUSTKA RAHMAT, 2016.

Tanjung, Abdul Hafiz. *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010*”, Bandung: ALFABETA, 2013.

TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI, 2015.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Usman Dan Lukman Pakaya, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Laporan Hasil Penelitian, Universitas Negeri Gorontalo 2014

Zamzami, Faiz *et.al., Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.

<https://www.materiakuntansi.com/kriteria-sistem-pengendalian-intern-yang-baik-dan-efektif>.

LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

I. Identitas Responden

(Berikan tanda check-list (✓) pada kotak yang tersedia)

1. Nama :
2. Umur : ☐ < 30 tahun ☐ 30 – 40 tahun ☐ > 40 tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : ☐ SLTA/Sederajat ☐ D-3 ☐ S-1
☐ S-2 ☐ S-3
5. Lama Bekerja : ☐ < 2 tahun ☐ 2-5 tahun ☐ > 5 tahun

II. Petunjuk Pengisian

1. Mohon Memberi Tanda checklist (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
3. Keterangan alternatif jawaban dan skor:
 - a. STS = Sangat Tidak Setuju (1)
 - b. TS = Tidak Setuju (2)
 - c. N = Netral (3)
 - d. S = Setuju (4)
 - e. SS = Sangat Setuju (5)

Variabel Pengendalian Intern Pemerintah						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Lingkungan Pengendalian (X1)						
1.	Pimpinan instansi telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai.					
2.	Instansi telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi.					
3.	Instansi memiliki memiliki struktur organisasi yang jelas mengenai seluruh fungsi yang ada dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab.					
4.	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi.					
5.	Pimpinan instansi selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai.					
Penilaian Risiko (X2)						
6.	Organisasi sudah mengimplementasikan manajemen risiko.					
7.	Tindakan perbaikan dilakukan dengan segera apabila terjadi kesalahan					
8.	Penempatan pegawai baru didasarkan atas keahlian.					
9.	Informasi baru mengenai risiko, biaya dan manfaat pemakaian teknologi disosialisasikan kepada pegawai.					
10.	Kebijakan baru selalu disosialisasikan kepada pegawai.					

Kegiatan Pengendalian (X3)						
11.	Aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja.					
12.	Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.					
13.	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik.					
14.	Instansi telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai.					
15.	Setiap transaksi dan aktivitas lainnya telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					
Informasi Dan Komunikasi (X4)						
16.	Informasi yang diperoleh dan dibutuhkan relatif cepat dan akurat.					
17.	Sistem informasi jelas dan telah menjamin kebutuhan kualitas data.					
18.	Budaya organisasi diterapkan menciptakan informasi dan komunikasi antar pekerjaan secara terbuka.					
19.	Ketersediaan informasi (kelengkapan) yang dibutuhkan dalam melakukan tugas-tugas instansi sudah baik.					
20.	Instansi mengkomunikasikan perihal pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal					
Pemantauan (X5)						
21.	Sudah tersedia prosedur kegiatan pemantauan yang efektif atas pelaksanaan pengendalian intern, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus.					
22.	Pengawasan langsung dilakukan oleh fungsi					

	auditor internal (Inspektorat)					
23.	Pengawasan dilakukan oleh pihak yang independen.					
24.	Instansi melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi					
25.	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.					

Variabel Kinerja Keuangan (Y)						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Keterlibatan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran.					
2.	Kinerja dari partisipasi penyusunan anggaran yang diberikan kepada masyarakat/publik telah memberikan manfaat atau kegunaan yang tepat lokasi dan tepat waktu.					
3.	Produk anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.					
4.	Hasil penyusunan anggaran dalam pelayanan produk layanan (proyek) yang dibangun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.					
5.	Dampak nyata dari hasil kinerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat/publik, sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari unit kerja masing-masing.					

REKAPITULASI DATA JAWABAN RESPONDEN

NO RESPONDEN	Lingkungan Pengendalian (X1)					TOTAL X1	Penilaian Risiko (X2)					TOTAL X2	Kegiatan Pengendalian (X3)					TOTAL X3
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	5	22	5	5	5	5	5	25
2	4	5	5	5	4	23	4	4	4	4	3	19	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25	4	4	3	3	3	17	4	5	5	4	4	22
4	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	4	23	4	4	4	4	3	19	4	3	4	3	4	18
6	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
7	5	4	4	4	5	22	3	3	3	3	4	16	3	4	4	4	3	18
8	5	5	5	5	5	25	4	3	4	4	4	19	5	5	4	5	5	24
9	4	5	5	5	4	23	4	3	4	4	3	18	4	4	4	4	4	20
10	5	5	5	5	5	25	3	3	4	4	4	18	5	5	4	5	5	24
11	4	5	5	4	5	23	3	4	4	3	4	18	4	3	4	4	3	18
12	5	4	4	5	5	23	4	3	5	4	4	20	5	5	4	4	4	22
13	4	5	5	4	4	22	4	5	5	5	4	23	4	3	4	3	4	18
14	4	4	4	4	4	20	3	3	4	4	3	17	4	3	3	3	4	17
15	4	5	5	5	4	23	4	3	4	4	3	18	4	4	3	3	4	18
16	5	5	5	5	5	25	3	4	4	4	4	19	3	3	4	4	4	18
17	5	4	4	5	5	23	3	3	3	3	4	16	4	4	4	5	4	21
18	5	5	5	5	4	24	4	4	3	3	4	18	3	3	3	4	3	16
19	5	4	4	5	5	23	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
20	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	20
21	4	4	5	4	5	22	4	5	5	5	4	23	5	3	5	3	4	20
22	5	5	5	5	5	25	3	4	4	4	4	19	5	4	5	5	5	24
23	5	4	4	5	5	23	4	5	5	5	5	24	4	3	4	4	4	19
24	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25

25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	15
26	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	4	21
27	5	5	4	4	3	21	4	4	5	5	5	23	4	3	3	4	4	18
28	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	5	24
31	5	5	5	5	5	25	3	3	3	4	4	17	3	4	3	3	3	16
32	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20
	151	151	151	154	150	757	127	126	132	131	131	647	132	125	127	128	129	641

Informasi Dan Komunikasi (X4)					TOTAL X4	Pemantauan (X5)					TOTAL X5	Kinerja Keuangan (Y)					TOTAL Y
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25	4	4	3	4	3	18	3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19	5	5	5	5	5	25
3	3	3	3	3	15	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19	3	3	3	3	3	15
4	3	4	3	3	17	4	4	3	4	3	18	4	3	3	4	3	17
4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	3	17	3	3	4	3	3	16
3	3	4	4	3	17	3	4	3	3	3	16	3	3	4	3	3	16
4	3	4	4	4	19	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	3	18	3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25

4	4	3	4	4	19	4	4	3	4	3	18	3	3	3	3	3	15
5	5	5	5	5	25	4	4	3	4	3	18	4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15	5	4	4	4	4	21	3	3	4	3	3	16
5	4	4	5	5	23	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	23	3	3	3	4	3	16	4	4	3	4	4	19
5	4	4	4	5	22	3	3	3	4	3	16	5	5	5	5	5	25
4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	5	21
4	4	3	4	4	19	5	5	5	5	5	25	3	3	4	3	3	16
4	5	4	5	4	22	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	4	23	4	4	4	3	4	19	3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	24
5	5	5	5	5	25	3	4	3	3	3	16	3	4	3	3	4	17
4	3	3	3	4	17	3	4	4	4	4	19	3	3	3	3	3	15
4	5	5	5	4	23	4	4	4	3	4	19	4	4	3	4	4	19
4	5	4	5	4	22	4	4	3	3	3	17	3	3	3	3	3	15
4	5	5	5	4	23	4	3	3	3	3	16	5	5	4	5	5	24
5	4	4	4	5	22	3	4	3	3	4	17	3	3	3	3	3	15
134	133	130	135	133	665	132	131	123	128	124	638	120	120	120	121	123	604

Uji Validitas

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Pengendalian

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	LingkunganPengendalian_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,072	-,082	,412*	,553**	,619**
	Sig. (2-tailed)		,693	,655	,019	,001	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X1.2	Pearson Correlation	,072	1	,845**	,234	-,107	,619**
	Sig. (2-tailed)	,693		,000	,198	,559	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X1.3	Pearson Correlation	-,082	,845**	1	,234	,157	,667**
	Sig. (2-tailed)	,655	,000		,198	,392	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	,412*	,234	,234	1	,323	,659**
	Sig. (2-tailed)	,019	,198	,198		,071	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X1.5	Pearson Correlation	,553**	-,107	,157	,323	1	,637**
	Sig. (2-tailed)	,001	,559	,392	,071		,000
	N	32	32	32	32	32	32
LingkunganPengendalian_X1	Pearson Correlation	,619**	,619**	,667**	,659**	,637**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	32	32	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Penilaian Risiko

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	PenilaianRisiko_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,628**	,563**	,575**	,599**	,805**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,001	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X2.2	Pearson Correlation	,628**	1	,676**	,690**	,589**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X2.3	Pearson Correlation	,563**	,676**	1	,902**	,536**	,871**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,002	,000
	N	32	32	32	32	32	32

X2.4	Pearson Correlation	,575**	,690**	,902**	1	,556**	,882**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,001	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X2.5	Pearson Correlation	,599**	,589**	,536**	,556**	1	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,001		,000
	N	32	32	32	32	32	32
PenilaianRisiko_X2	Pearson Correlation	,805**	,857**	,871**	,882**	,784**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kegiatan Pengendalian

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	KegiatanPengendalian_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,650**	,687**	,620**	,857**	,882**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X3.2	Pearson Correlation	,650**	1	,563**	,725**	,687**	,850**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X3.3	Pearson Correlation	,687**	,563**	1	,609**	,670**	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X3.4	Pearson Correlation	,620**	,725**	,609**	1	,731**	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X3.5	Pearson Correlation	,857**	,687**	,670**	,731**	1	,911**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	32	32	32	32	32	32
KegiatanPengendalian_X3	Pearson Correlation	,882**	,850**	,811**	,858**	,911**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Informasi dan Komunikasi

		Correlations					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	InformasiDanKomunikasi_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	,573**	,539**	,553**	,960**	,828**
	Sig. (2-tailed)		,001	,001	,001	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X4.2	Pearson Correlation	,573**	1	,735**	,824**	,618**	,888**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X4.3	Pearson Correlation	,539**	,735**	1	,773**	,514**	,837**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,003	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X4.4	Pearson Correlation	,553**	,824**	,773**	1	,616**	,885**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X4.5	Pearson Correlation	,960**	,618**	,514**	,616**	1	,850**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000		,000
	N	32	32	32	32	32	32
InformasiDanKomunikasi_X4	Pearson Correlation	,828**	,888**	,837**	,885**	,850**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pemantauan

		Correlations					
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Pemantauan_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	,724**	,792**	,676**	,748**	,879**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X5.2	Pearson Correlation	,724**	1	,745**	,614**	,752**	,850**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X5.3	Pearson Correlation	,792**	,745**	1	,750**	,978**	,960**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
X5.4	Pearson Correlation	,676**	,614**	,750**	1	,712**	,839**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32

X5.5	Pearson Correlation	,748**	,752**	,978**	,712**	1	,943**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	32	32	32	32	32	32
Pemantauan_X5	Pearson Correlation	,879**	,850**	,960**	,839**	,943**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Keuangan

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	KinerjaKeuangan_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,950**	,727**	,977**	,889**	,971**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
Y.2	Pearson Correlation	,950**	1	,727**	,929**	,937**	,971**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
Y.3	Pearson Correlation	,727**	,727**	1	,715**	,729**	,823**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
Y.4	Pearson Correlation	,977**	,929**	,715**	1	,911**	,969**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	32	32	32	32	32	32
Y.5	Pearson Correlation	,889**	,937**	,729**	,911**	1	,955**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	32	32	32	32	32	32
KinerjaKeuangan_Y	Pearson Correlation	,971**	,971**	,823**	,969**	,955**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Lingkungan Pengendalian

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	32	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,633	,642	5

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4,72	,457	32
X1.2	4,72	,457	32
X1.3	4,72	,457	32
X1.4	4,81	,397	32
X1.5	4,69	,535	32

Inter-Item Correlation Matrix					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
X1.1	1,000	,072	-,082	,412	,553
X1.2	,072	1,000	,845	,234	-,107
X1.3	-,082	,845	1,000	,234	,157
X1.4	,412	,234	,234	1,000	,323
X1.5	,553	-,107	,157	,323	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	18,94	1,544	,366	,705	,590
X1.2	18,94	1,544	,366	,892	,590
X1.3	18,94	1,480	,432	,897	,558
X1.4	18,84	1,555	,461	,244	,551
X1.5	18,97	1,451	,335	,734	,613

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
23,66	2,168	1,473	5

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penilaian Risiko**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	32	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,894	,895	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	3,97	,740	32
X2.2	3,94	,759	32
X2.3	4,13	,707	32
X2.4	4,09	,689	32
X2.5	4,09	,734	32

Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
X2.1	1,000	,628	,563	,575	,599
X2.2	,628	1,000	,676	,690	,589
X2.3	,563	,676	1,000	,902	,536
X2.4	,575	,690	,902	1,000	,556
X2.5	,599	,589	,536	,556	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	16,25	6,194	,688	,493	,883
X2.2	16,28	5,886	,763	,583	,866
X2.3	16,09	6,023	,792	,820	,860
X2.4	16,13	6,048	,811	,829	,856
X2.5	16,13	6,306	,658	,453	,890

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,22	9,273	3,045	5

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kegiatan Pengendalian**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	32	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,912	,914	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3.1	4,13	,751	32
X3.2	3,91	,818	32
X3.3	3,97	,695	32
X3.4	4,00	,762	32
X3.5	4,03	,695	32

Inter-Item Correlation Matrix

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
X3.1	1,000	,650	,687	,620	,857
X3.2	,650	1,000	,563	,725	,687
X3.3	,687	,563	1,000	,609	,670
X3.4	,620	,725	,609	1,000	,731
X3.5	,857	,687	,670	,731	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	15,91	6,604	,808	,767	,886
X3.2	16,13	6,500	,749	,595	,900
X3.3	16,06	7,157	,713	,530	,906
X3.4	16,03	6,676	,770	,649	,894
X3.5	16,00	6,710	,860	,802	,877

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,03	10,289	3,208	5

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Informasi dan Komunikasi

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	32	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,909	,910	5

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
X4.1	4,19	,592	32
X4.2	4,16	,767	32
X4.3	4,06	,669	32
X4.4	4,22	,659	32
X4.5	4,16	,628	32

Inter-Item Correlation Matrix					
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
X4.1	1,000	,573	,539	,553	,960
X4.2	,573	1,000	,735	,824	,618
X4.3	,539	,735	1,000	,773	,514
X4.4	,553	,824	,773	1,000	,616
X4.5	,960	,618	,514	,616	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	16,59	5,668	,742	,938	,895
X4.2	16,63	4,823	,802	,721	,884
X4.3	16,72	5,370	,740	,696	,895
X4.4	16,56	5,222	,815	,780	,879
X4.5	16,63	5,468	,766	,943	,889

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,78	8,112	2,848	5

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemantauan**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	32	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,938	,937	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X5.1	4,13	,751	32
X5.2	4,09	,689	32
X5.3	3,84	,847	32
X5.4	4,00	,762	32
X5.5	3,88	,833	32

Inter-Item Correlation Matrix

	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5
X5.1	1,000	,724	,792	,676	,748
X5.2	,724	1,000	,745	,614	,752
X5.3	,792	,745	1,000	,750	,978
X5.4	,676	,614	,750	1,000	,712
X5.5	,748	,752	,978	,712	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5.1	15,81	8,093	,811	,701	,927
X5.2	15,84	8,523	,777	,634	,934
X5.3	16,09	7,184	,931	,968	,904
X5.4	15,94	8,254	,751	,591	,938
X5.5	16,06	7,351	,904	,962	,909

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,94	12,125	3,482	5

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Keuangan

Case Processing Summary

	N	%
Valid	32	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	32	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,966	,966	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	3,75	,803	32
Y.2	3,75	,803	32
Y.3	3,75	,718	32
Y.4	3,78	,832	32
Y.5	3,84	,847	32

Inter-Item Correlation Matrix

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
Y.1	1,000	,950	,727	,977	,889
Y.2	,950	1,000	,727	,929	,937
Y.3	,727	,727	1,000	,715	,729
Y.4	,977	,929	,715	1,000	,911
Y.5	,889	,937	,729	,911	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	15,13	8,952	,953	,976	,950
Y.2	15,13	8,952	,953	,952	,950
Y.3	15,13	10,242	,744	,566	,982
Y.4	15,09	8,797	,950	,970	,951
Y.5	15,03	8,805	,927	,921	,955

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18,88	14,177	3,765	5

Uji Asumsi Klasik

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Risiko ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,686	,625	2,305

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Risiko

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	301,353	5	60,271	11,343	,000 ^b
	Residual	138,147	26	5,313		
	Total	439,500	31			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Risiko

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,319	9,205		-1,664	,108
	Lingkungan Pengendalian	1,194	,307	,467	3,885	,001
	Penilaian Risiko	-,610	,158	-,493	-3,869	,001

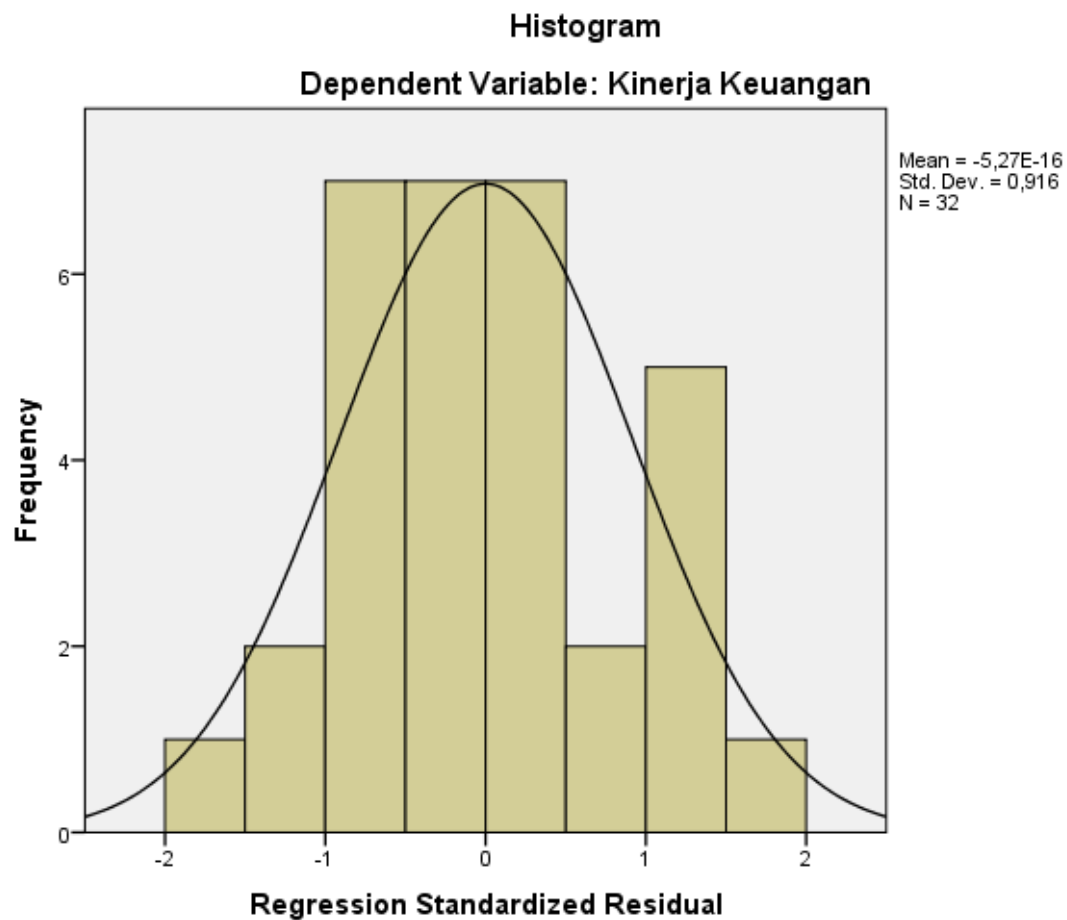
Kegiatan Pengendalian	-,389	,137	-,331	-2,844	,009
Informasi Dan Komunikasi	,666	,162	,503	4,113	,000
Pemantauan	,614	,142	,568	4,329	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Residuals Statistics^a

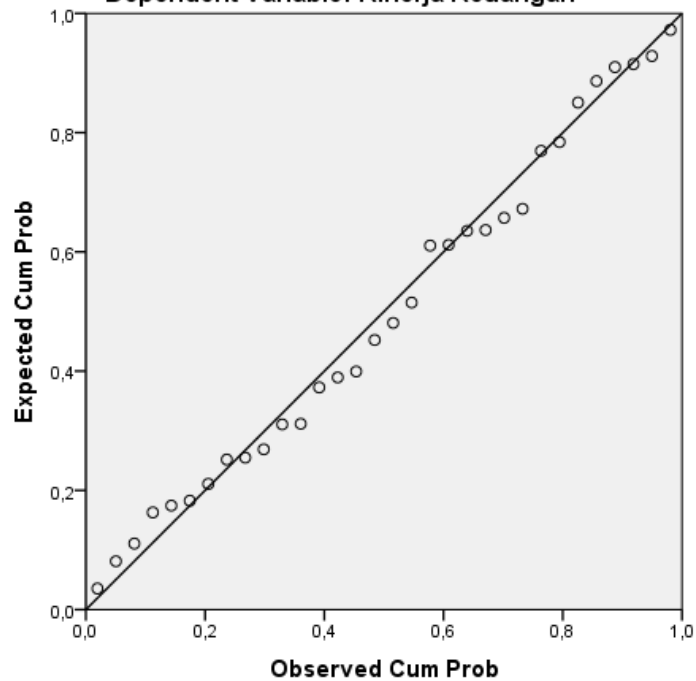
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,30	26,54	18,88	3,118	32
Residual	-4,165	4,420	,000	2,111	32
Std. Predicted Value	-1,788	2,459	,000	1,000	32
Std. Residual	-1,807	1,917	,000	,916	32

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan



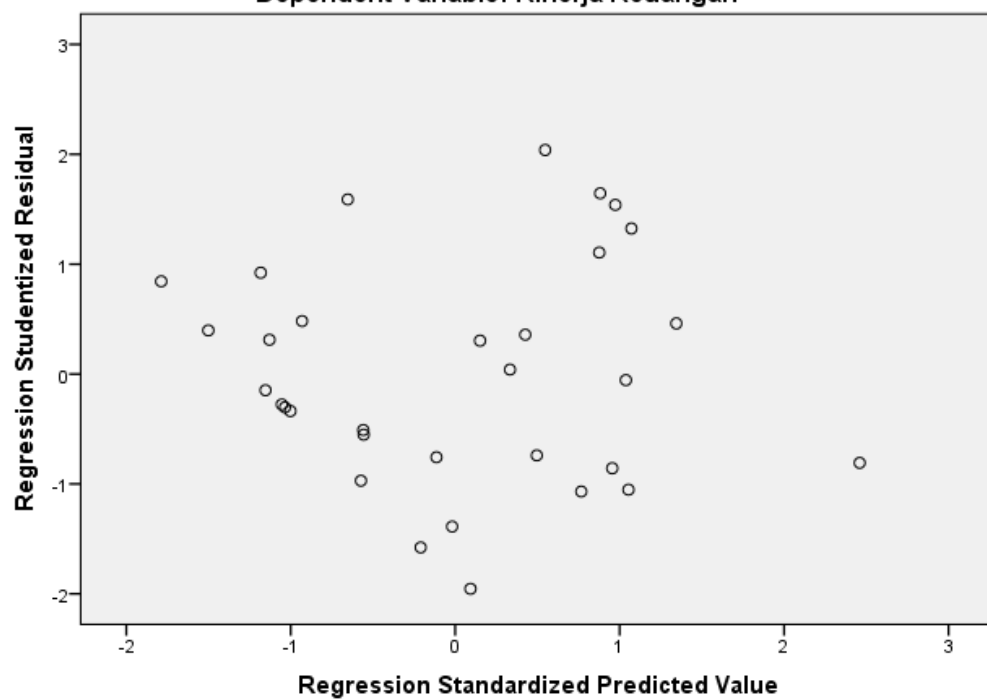
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Keuangan



Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Keuangan



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,11100488
	Absolute	,079
Most Extreme Differences	Positive	,079
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,448
Asymp. Sig. (2-tailed)		,988

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Risiko ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,686	,625	2,305

a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Risiko

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	301,353	5	60,271	11,343	,000 ^b
Residual	138,147	26	5,313		
Total	439,500	31			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Lingkungan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Penilaian Risiko

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-15,319	9,205		-1,664	,108		
Lingkungan Pengendalian	1,194	,307	,467	3,885	,001	,838	1,194
Penilaian Risiko	-,610	,158	-,493	-3,869	,001	,744	1,344
Kegiatan Pengendalian	-,389	,137	-,331	-2,844	,009	,890	1,123
Informasi Dan Komunikasi	,666	,162	,503	4,113	,000	,807	1,239
Pemantauan	,614	,142	,568	4,329	,000	,702	1,425

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Coefficient Correlations^a

Model		Pemantauan	Kegiatan Pengendalian	Lingkungan Pengendalian	Informasi Dan Komunikasi	Penilaian Risiko
1	Pemantauan	1,000	,157	-,101	,238	-,480
	Kegiatan Pengendalian	,157	1,000	-,158	,230	-,090
	Lingkungan Pengendalian	-,101	-,158	1,000	,256	-,106
	Informasi Dan Komunikasi	,238	,230	,256	1,000	-,157
	Penilaian Risiko	-,480	-,090	-,106	-,157	1,000
	Pemantauan	,020	,003	-,004	,005	-,011
	Kegiatan Pengendalian	,003	,019	-,007	,005	-,002
	Lingkungan Pengendalian	-,004	-,007	,094	,013	-,005
	Informasi Dan Komunikasi	,005	,005	,013	,026	-,004
	Penilaian Risiko	-,011	-,002	-,005	-,004	,025

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	Lingkungan Pengendalian	Penilaian Risiko	Kegiatan Pengendalian	Informasi Dan Komunikasi	Pemantauan
1	1	5,921	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,031	13,716	,00	,00	,06	,10	,09	,32
	3	,027	14,875	,00	,00	,00	,44	,24	,00
	4	,012	22,105	,00	,01	,93	,00	,01	,38
	5	,007	29,128	,04	,21	,00	,44	,33	,28
	6	,001	67,188	,95	,78	,00	,02	,34	,01

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Anju Agustin Damanik
Nim : 52153041
Tpt/Tgl Lahir : Rappah, 16 Agustus 1996
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Rappah, Desa Damak Urat Kec. Sipispis, Kab. Serdang
Begadai

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 105448 Desa Damak Urat Berijazah tahun 2008
Tamatan SMP Swasta Jayakarta Desa Damak Urat Berijazah tahun 2011
Tamatan SMA Dipanegara Tebing Tinggi Berijazah tahun 2014
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2019

III. RIWAYAT ORGANISASI

Anggota KSEI UIE Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2017)